

### PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Ringroad Barat Madiun, Kode Pos 63125 Jawa Timur Telepon (0351) 464242 Fax (0351) 466437

e-mail: dinkes.madiunkota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN NOMOR: 440/ 3/2 9 /401.103/2020

### TENTANG STANDART PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

#### Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
  - b. bahwa sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Kota Madiun tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 067/3000/401.021/2019 tentang Evaluasi Pelayanan Publik dan Evaluasi Ketata Laksanaan Tahun 2019 dan hasil Verifikasi Standart Pelayanan tanggal 20 januari 2020;
  - c. bahwa dengan pertimbanagn sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tentang Standart Pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  - Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 4. Undang undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun
     2014 tentang Puskesmas;

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan PERTAMA

: Standart Pelayanan pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, dengan sebagai berikut ;

- a. Standart Pelayanan Penerbitan Rekomendasi pemenuhan komitmen Ijin Usaha Apotik
- Standart Pelayanan Penerbitan Rekomendasi pemenuhan komitmen Ijin Usaha Klinik;
- c. Standart Pelayanan Penerbitan Rekomendasi pemenuhan komitmen Ijin Usaha Laboratorium Klinik ;
- d. Standart Pelayanan Penerbitan Rekomendasi pemenuhan komitmen Ijin Usaha Toko Obat;
- e. Standart Pelayanan Penerbitan Rekomendasi pemenuhan komitmen Ijin Usaha Rumah Sakit ;
- f. Standart Pelayanan Penerbitan Rekomendasi pemenuhan komitmen Ijin Usaha Optik;
- g. Standart Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Ijin Tenaga Kesehatan
- h. Standart Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Ijin Praktik Dokter /Dokter Gigi
- Standart Pelayanan Kartu Indonesia Sehat penerima Bea Iur Daerah (KIS PBID)
- j. Standart Pelayanan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan / Restoran
- k. Standart Pelayanan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga
- I. Standart Pelayanan Penerbitan Sertifikat Laik Sehat Hotel
- m. Standart Pelayanan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum
- n. Standart Pelayanan peneribitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)

**KEDUA** 

: Pelaksanaan Standart Pelayanan ini melekat pada tugas pokok dan fungsi masing masing Bidang pada Dinas Kesehata dan KB Kota Madiun

**KETIGA** 

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kota Madiun ;

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di **M A D I U N** Pada tanggal: 24 Januari 2020

DINAS KESEHATAN
OAN
KELUARGA BERENCAN

KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KB

dr. AGUNG S.WARDANI,M.MKes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630106 198903 2 007

### Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Dasar Hukum	Permenkes no. 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum Perda Kota Madiun no 1 tahun 2019 ttg Penyelenggaraan Perizinan Basilitas Pelayanan Kesehatan Dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan	
2	Persyaratan Pelayanan	a Permohon mengajukan permohonan laik Higiene Depot Air Minum b Fotocopy KTP / KK Domisili Kota Madiun c Denah lokasi Depot Air Minum d Fotocopy Sertifikat Pelatihan/Kursus Higiene Sanitasi DAM e Foto Copi SIUP/TDP f Hasil lab Kualitas air	
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengajukan surat permohonan penerbitan Sertifikat Laik Hiqiene Saniatasi Depot Air Minum Dilakukan penelitian oleh petugas, jika persyaratan sudah lengkap akan dilakukan kunjungan/visitasi ke lokasi produksi Dilakukan kunjungan/ visitasi ke tempat produksi Dilakukan pengambilan sampel kualitas air  Jika Hasil inspeksi minimal cukup dan hasil lab kualitas air Baik , akan diterbitkan Sertifat Laik Hiqiene Sanitasi Depot Air Minum	
4	Jangka Waktu Penyelesaian	: Lima (5) hari sejak persyaratan masuk secara lengkap	
5	Tarif/Biaya	: Gratis / Tidak di kenakan biaya	
6	Produk layanan	: Sertifikat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum	
7	Kompetensi Pelaksana	: D3 Kesling	
8	Kompetensi Pelaksana	: D3 Kesling	
9	Pengawasan internal	: Sistem Pengendalian internal dan Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala Seksi Keseatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
	Penangan Pengaduan , saran dan masukan	a Kotak Saran b Web Dinas Kesehatan & KB Kota Madiu	
11	Jumlah Pelaksana	2 ( dua ) orang	
12	Jaminan Pelayanan	SOP Pelayanan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum	
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a Kepastian Regulasi b Kontak Pengaduan masyarakat tentang pelayanan Kesehatan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a Laporan periodik b Masukan/saran pemohon/stakeholder c Rapat evaluasi tim visitasi	

## Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Dasar Hukum	Permenkes no. 1096 Tahun 2011 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Jasaboga Perda Kota Madiun no 1 tahun 2019 ttg Penyelenggaraan Perizinan B Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan	
2	Persyaratan Pelayanan	a Permohon mengajukan permohonan laik Higiene Sanitasi jasaboga b Fotocopy KTP / KK Domisili Kota Madiun c Contoh Label Kemasan Pangan d Denah lokasi dapur/Ruang Pengolahan Fotocopy Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan f Hasil lab angka kuman pada makanan, alat makan dan alat masak g 6) Hasil lab Kualitas air	
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengajukan surat permohonan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Saniatasi Jasaboga Dilakukan penelitian oleh petugas, jika persyaratan sudah lengkap akan dilakukan kunjungan/visitasi ke lokasi produksi Dilakukan kunjungan/ visitasi ke tempat produksi Dilakukan pengambilan sampel makanan, sampel Usap alat masak, usap alat makan dan kualitas air Jika Hasil inspeksi minimal cukup dan hasil lab angka kuman semua negatif, akan diterbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga	
4	Jangka Waktu Penyelesaian	: Lima (5) hari sejak persyaratan masuk secara lengkap	
5	Tarif/Biaya	: Gratis / Tidak di kenakan biaya	
6	Produk layanan	: Sertifikat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga	
7	Kompetensi Pelaksana	: D3 Kesling	
8	Kompetensi Pelaksana	: D3 Kesling	
9	Pengawasan internal	: Sistem Pengendalian internal dan Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala Seksi Keseatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
10	Penangan Pengaduan ,	a Kotak Saran	
	saran dan masukan	b Web Dinas Kesehatan & KB Kota Madiu	
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang	
12	Jaminan Pelayanan	SOP Pelayanan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Jasaboga	
13	Jaminan Keamanan dan	a Kepastian Regulasi	
	Keselamatan Pelayanan	b Kontak Pengaduan masyarakat tentang pelayanan Kesehatan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a Laporan periodik b Masukan/saran pemohon/stakeholder c Rapat evaluasi tim visitasi	

## Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan / Restoran

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Dasar Hukum	Permenkes no. 1098 Tahun 2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran Perda Kota Madiun no 1 tahun 2019 ttg Penyelenggaraan Perizinan Basilitas Pelayanan Kesehatan Dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan	
2	Persyaratan Pelayanan	Permohon mengajukan permohonan laik Higiene Sanitasi Rumah Makan / Restoran Fotocopy KTP / KK Domisili Kota Madiun Denah lokasi dapur/Ruang Pengolahan Fotocopy Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan Hasil lab angka kuman pada makanan, alat makan dan alat masak Hasil lab Kualitas air	
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengajukan surat permohonan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Saniatasi Rumah Makan /Restoran Dilakukan penelitian oleh petugas, jika persyaratan sudah lengkap akan dilakukan kunjungan/visitasi ke lokasi produksi Dilakukan kunjungan/ visitasi ke tempat produksi Dilakukan pengambilan sampel makanan, sampel Usap alat masak, usap alat makan dan kualitas air Jika Hasil inspeksi minimal cukup dan hasil lab angka kuman semua negatif, akan diterbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan /Restoran	
4	Jangka Waktu Penyelesaian	: Lima (5) hari sejak persyaratan masuk secara lengkap	
5	Tarif/Biaya	Gratis / Tidak di kenakan biaya	
6	Produk layanan	Sertifikat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan / Restoran	
7	Kompetensi Pelaksana	: D3 Kesling	
8	Kompetensi Pelaksana	: D3 Kesling	
9	Pengawasan internal	: Sistem Pengendalian internal dan Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala Seksi Keseatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
10	Penangan Pengaduan , saran dan masukan	a Kotak Saran b Web Dinas Kesehatan & KB Kota Madiu	
11	Jumlah Pelaksana	2 ( dua ) orang	
12	Jaminan Pelayanan	SOP Pelayanan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan /Restoran	
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a Kepastian Regulasi b Kontak Pengaduan masyarakat tentang pelayanan Kesehatan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a Laporan periodik b Masukan/saran pemohon/stakeholder c Rapat evaluasi tim visitasi	

### Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Dasar Hukum	Perda Kota Madiun no 1 tahun 2019 ttg Penyelenggaraan Perizinan a Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan b Surat Keputusan Kepala Badan POM No. 22 tahun 2018	
2	Persyaratan Pelayanan	a Fotocopy KTP / KK Domisili Kota Madiun b Contoh Label Kemasan Pangan c Contoh produ makanan /minuman resiko rendah d Fotocopy Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan	
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	a Pemohon mengisi Blangko/Formulir pendaftaran P-IRT  b Pemohon menyerahkan Formulir pendaftaran yang telah di isi lengkap semua persyaratan  c Dilakukan penelitian oleh petugas, jika persyaratan sudah lengkap akan dilakukan kunjungan/visitasi ke lokasi produksi  d Dilakukan kunjungan/ visitasi ke tempat produksi  e Dilakukan kunjungan/ visitasi ke tempat produksi  pangan IRT	
4	Jangka Waktu Penyelesaian	: Lima (5) hari sejak persyaratan masuk secara lengkap	
5	Tarif/Biaya	: Gratis / Tidak di kenakan biaya	
6	Produk layanan	: Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	
7	Kompetensi Pelaksana	D3 Kesling	
8	Kompetensi Pelaksana	: D3 Kesling	
9	Pengawasan internal	: Sistem Pengendalian internal dan Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala Seksi Keseatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
10	Penangan Pengaduan , saran dan masukan	a Kotak Saran b Web Dinas Kesehatan & KB Kota Madiu	
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang	
12	Jaminan Pelayanan	SOP Pelayanan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	
13	Jaminan Keamanan dan	a Kepastian Regulasi	
	Keselamatan Pelayanan	b Kontak Pengaduan masyarakat tentang pelayanan Kesehatan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a Laporan periodik b Masukan/saran pemohon/stakeholder c Rapat evaluasi tim visitasi	

### Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Laik Sehat Hotel

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Dasar Hukum	a Permenkes no. 80 Tahun 1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel Perda Kota Madiun no 1 tahun 2019 ttg Penyelenggaraan Perizinan b Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan	
b Fotocopy KTP / KK Domisili Kota Madiun c Denah lokasi Bangunan Hotel dan dapur/Ruang d Fotocopy SIUP / TDUP		b Fotocopy KTP / KK Domisili Kota Madiun c Denah lokasi Bangunan Hotel dan dapur/Ruang Pengolahan d Fotocopy SIUP / TDUP Hasil lab angka kuman pada makanan, alat makan dan alat masak jika hotel dilengkapiasilitas Restoran	
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengajukan surat permohonan penerbitan Sertifikat Laik Seh Hotel  Dilakukan penelitian oleh petugas, jika persyaratan sudah lengkap akan dilakukan kunjungan/visitasi ke lokasi tempat usaha  Dilakukan kunjungan/ visitasi ke tempat produksi  Dilakukan pengambilan sampel makanan, sampel Usap alat masak, usa alat makan dan kualitas air  Jika Hasil inspeksi minimal cukup dan hasil lab angka kuman semua negatif, akan diterbitkan Sertifikat Laik Sehat Hotel	
4	Jangka Waktu Penyelesaian	: Lima (5) hari sejak persyaratan masuk secara lengkap	
5	Tarif/Biaya	: Gratis / Tidak di kenakan biaya	
6	Produk layanan	: Sertifikat Sertifikat Laik Sehat Hotel	
7	Kompetensi Pelaksana	: D3 Kesling	
8	Kompetensi Pelaksana	: D3 Kesling	
9	Pengawasan internal	: Sistem Pengendalian internal dan Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala Seksi Keseatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
10	Penangan Pengaduan ,	a Kotak Saran	
	saran dan masukan	b Web Dinas Kesehatan & KB Kota Madiu	
11	Jumlah Pelaksana	2 ( dua ) orang	
12	Jaminan Pelayanan	SOP Pelayanan Sertifikasi Laik Sehat Hotel	
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a Kepastian Regulasi b Kontak Pengaduan masyarakat tentang pelayanan Kesehatan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a Laporan periodik b Masukan/saran pemohon/stakeholder c Rapat evaluasi tim visitasi	

# STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI PEMENUHAN KOMITMEN IJIN USAHA APOTEK

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol> <li>PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Terpadu Secara Elektronik</li> <li>Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek</li> <li>Permenkes No 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Izin Usaha Secara Elektronik Sektor Kesehatan</li> <li>Peraturan Walikota Madiun No 34 tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun</li> </ol>
2.	PERSYARATAN (TEKNIS & ADMINISTRASI)	<ol> <li>Surat Tanda Registrasi Apoteker</li> <li>Rekomendasi Organisasi Profesi</li> <li>Surat pernyataan akan melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai peraturan/ perundangan</li> <li>SOP pelayanan kefarmasian di apotek</li> <li>Daftar sarana, prasarana dan peralatan Apotek</li> </ol>
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	Semua persyaratan (teknis dan administrasi) di- scan/foto dan diposting dalam Aplikasi OSS
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	7 (tujuh) hari kerja setelah notifikasi dan tidak ada visitasi ulang
5.	BIAYA /TARIF	Tidak dipungut biaya
6.	PRODUK LAYANAN	Surat Rekomendasi Izin Apotek
7.	SARANA PRASARANA DAN FASILITAS	<ol> <li>1. 1 (set) komputer</li> <li>2. Aplikasi MASS</li> <li>3. Jaringan internet</li> </ol>
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	D3 Kesehatan
9.	PENGAWASAN INTERNAL	Berita Acara Pemeriksaan Apotek ditanda tangani oleh tim visitasi dan diketahui atasan langsung
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Web Dinas Kesehatan &amp; KB Kota Madiun</li> </ol>
11.	EVALUASI PELAKSANAAN	Evaluasi dilaksanakan secara periodik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Apotek, rapat koordinasi maupun adanya saran/masukan dari stakeholder
12.	JAMINAN PELAYANAN	<ol> <li>SOP Pelayanan Rekomendasi Izin Apotek</li> <li>OSS dapat dilakukan apabila Aplikasi MASS tidak mengalami gangguan</li> </ol>
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Tidak ada (pelayanan berbasis online)
14.	EVALUASI KINERJA	<ol> <li>Laporan periodik</li> <li>Masukan/saran pemohon/stakeholder</li> <li>Rapat evaluasi tim visitasi</li> </ol>

# STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI PEMENUHAN KOMITMEN IJIN USAHA KLINIK

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol> <li>PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Terpadu Secara Elektronik</li> <li>Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik</li> <li>Permenkes No 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Izin Usaha Secara Elektronik Sektor Kesehatan</li> <li>Peraturan Walikota Madiun No 34 tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun</li> </ol>
2.	PERSYARATAN (TEKNIS & ADMINISTRASI)	<ol> <li>Nomor Izin Berusaha Klinik</li> <li>Surat pernyataan kesanggupan dokter penanggung jawab</li> <li>Daftar sarana, prasarana dan perakatan klinik</li> <li>Gambar denah ruangan klinik</li> <li>Daftar ketenagaan</li> <li>UKL/UPL bagi Klinik Rawat Inap, dan SPPL bagi Klinik Rawat Jalan</li> <li>SOP pelayanan klinik</li> </ol>
3.)	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	Semua persyaratan (teknis dan administrasi) di-
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	scan/foto dan diposting dalam Aplikasi OSS 7 (tujuh) hari kerja setelah notifikasi dan tidak ada visitasi ulang
(5.)	BIAYA /TARIF	Tidak dipungut biaya
6.	PRODUK LAYANAN	Surat Rekomendasi Izin Klinik
7.	SARANA PRASARANA DAN FASILITAS	<ol> <li>1 (set) komputer</li> <li>Aplikasi MASS</li> <li>Jaringan internet</li> </ol>
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	D3 Kesehatan
9.	PENGAWASAN INTERNAL	Berita Acara Pemeriksaan Klinik ditanda tangani oleh tim visitasi dan diketahui atasan langsung
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Web Dinas Kesehatan &amp; KB Kota Madiun</li> </ol>
11.	EVALUASI PELAKSANAAN	Evaluasi dilaksanakan secara periodik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Klinik, rapat koordinasi maupun adanya saran/masukan dari stakeholder
12.	JAMINAN PELAYANAN	SOP Pelayanan Rekomendasi Izin Klinik     OSS dapat dilakukan apabila Aplikasi MASS tidak mengalami gangguan
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Tidak ada (pelayanan berbasis online)
14.	EVALUASI KINERJA	Laporan periodik     Masukan/saran pemohon/stakeholder     Rapat evaluasi tim visitasi

5

# STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI PEMENUHAN KOMITMEN IJIN USAHA LABORATORIUM KLINIK

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol> <li>PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Terpadu Secara Elektronik</li> <li>Permenkes No. 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratoratorium Klinik</li> <li>Permenkes No 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Izin Usaha Secara Elektronik Sektor Kesehatan</li> <li>Peraturan Walikota Madiun No 34 tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun</li> </ol>
2.	PERSYARATAN (TEKNIS & ADMINISTRASI)	<ol> <li>Nomor Izin Berusaha Laboratorium Klinik</li> <li>Surat pernyataan kesanggupan dokter penanggung jawab</li> <li>Daftar sarana, prasarana dan peralatan laboratorium klinik</li> <li>Gambar denah ruangan laboratorium klinik</li> <li>Daftar ketenagaan</li> <li>Dokumen UKL/UPL</li> <li>SOP pelayanan laboratorium kliniksarana, prasarana dan peralatan Apotek</li> </ol>
(3.)	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	Semua persyaratan (teknis dan administrasi) di- scan/foto dan diposting dalam Aplikasi OSS
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	7 (tujuh) hari kerja setelah notifikasi dan tidak ada visitasi ulang
(5.)	BIAYA /TARIF	Tidak dipungut biaya
6.	PRODÚK LAYANAN	Surat Rekomendasi Izin laboratorium Klinik
7.	SARANA PRASARANA DAN FASILITAS	<ol> <li>1. 1 (set) komputer</li> <li>2. Aplikasi MASS</li> <li>3. Jaringan internet</li> </ol>
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	D3 Kesehatan
9.	PENGAWASAN INTERNAL	Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Klnik ditanda tangani oleh tim visitasi dan diketahui atasan langsung
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Web Dinas Kesehatan &amp; KB Kota Madiun</li> </ol>
11.	EVALUASI PELAKSANAAN	Evaluasi dilaksanakan secara periodik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Klinik, rapat koordinasi maupun adanya saran/masukan dari stakeholder
12.	JAMINAN PELAYANAN	<ol> <li>SOP Pelayanan Rekomendasi Izin Laboratorium Klinik</li> <li>OSS dapat dilakukan apabila Aplikasi MASS tidak mengalami gangguan</li> </ol>
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Tidak ada (pelayanan berbasis online)
14.	EVALUASI KINERJA	<ol> <li>Laporan periodik</li> <li>Masukan/saran pemohon/stakeholder</li> <li>Rapat evaluasi tim visitasi</li> </ol>

# STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI PEMENUHAN KOMITMEN IJIN USAHA TOKO OBAT

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol> <li>PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Terpadu Secara Elektronik</li> <li>Kepmenkes 1331/IvIENKES/SKDV2002 tentang Perubahan Atas Permenkes 167/KAB/B.VIII/197 2 tentang Pedagang Eceran Obat</li> <li>Permenkes No 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Izin Usaha Secara Elektronik Sektor Kesehatan</li> <li>Peraturan Walikota Madiun No 34 tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun</li> </ol>
2.	PERSYARATAN (TEKNIS & ADMINISTRASI)	<ol> <li>STRTTK penanggung jawab</li> <li>Rekomendasi Organisasi Profesi</li> <li>surat pernyataan akan melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai peraturan/ perundangan</li> <li>SOP pelayanan kefarmasian di toko ob at</li> </ol>
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	Semua persyaratan (teknis dan administrasi) di- scan/foto dan diposting dalam Aplikasi OSS
4.)	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	7 (tujuh) hari kerja setelah notifikasi dan tidak ada visitasi ulang
(5.)	BIAYA /TARIF	Tidak dipungut biaya
6.	PRODUK LAYANAN	Surat Rekomendasi Izin Toko Obat
7.	SARANA PRASARANA DAN FASILITAS	<ol> <li>1. 1 (set) komputer</li> <li>2. Aplikasi MASS</li> <li>3. Jaringan internet</li> </ol>
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	D3 Kesehatan
9.	PENGAWASAN INTERNAL	Berita Acara Pemeriksaan Toko Obat ditanda tangani oleh tim visitasi dan diketahui atasan langsung
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Web Dinas Kesehatan &amp; KB Kota Madiun</li> </ol>
11.	EVALUASI PELAKSANAAN	Evaluasi dilaksanakan secara periodik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Toko Obat, rapat koordinasi maupun adanya saran/masukan dari stakeholder
12.	JAMINAN PELAYANAN	<ol> <li>SOP Pelayanan Rekomendasi Izin Toko Obat</li> <li>OSS dapat dilakukan apabila Aplikasi MASS tidak mengalami gangguan</li> </ol>
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Tidak ada (pelayanan berbasis online)
14.	EVALUASI KINERJA	<ol> <li>Laporan periodik</li> <li>Masukan/saran pemohon/stakeholder</li> <li>Rapat evaluasi tim visitasi</li> </ol>

# STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI PEMENUHAN KOMITMEN IJIN USAHA RUMAH SAKIT

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol> <li>PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Terpadu Secara Elektronik</li> <li>Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit</li> <li>Permenkes No 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Izin Usaha Secara Elektronik Sektor Kesehatan</li> <li>Peraturan Walikota Madiun No 34 tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun</li> </ol>
2.	PERSYARATAN (TEKNIS & ADMINISTRASI)	<ol> <li>Izin Mendirikan RS, bagi permohonan Izin Operasional untuk pertama kali</li> <li>Profil RS (visi, misi, lingkup kegiatan, rencana strategi dan struktur organisasi</li> <li>Isian instrumen self assessment RS</li> <li>Gambar desain (blue print) bangunan</li> <li>Izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi</li> <li>Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan</li> <li>Daftar SDM dan peralatan medis, nonmedis</li> <li>Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan</li> <li>BA Hasil Uji Fungsi Alat Kesehatan</li> <li>Dokumen badan hukum atau kepemilikan</li> <li>Peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws)</li> <li>SK komite medik, SK komite keperawatan dan satuan pemeriksaan internal</li> <li>Daftar SIP dan SIK tenaga kesehatan</li> <li>SOP kredensial staf medis</li> </ol>
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	Semua persyaratan (teknis dan administrasi) di- scan/foto dan diposting dalam Aplikasi OSS
4.)	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	45 (empat puluh lima) hari kerja setelah notifikasi dan tidak ada visitasi ulang
5.)	BIAYA /TARIF	Tidak dipungut biaya
6.	PRODUK LAYANAN	Surat Rekomendasi Izin Rumah Sakit
7.	SARANA PRASARANA DAN FASILITAS	<ol> <li>1 (set) komputer</li> <li>Aplikasi MASS</li> <li>Jaringan internet</li> </ol>
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	D3 Kesehatan
9.	PENGAWASAN INTERNAL	Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit ditanda tangani oleh tim visitasi yang terdiri dari Dinas Kesehatan Kota Madiun, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan PERSI Jawa Timur
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Kotak Saran     Web Dinas Kesehatan & KB Kota Madiun
11.	EVALUASI PELAKSANAAN	Evaluasi dilaksanakan secara periodik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan RS, rapat koordinasi maupun adanya saran/masukan dari stakeholder

12.	JAMINAN PELAYANAN	<ol> <li>SOP Pelayanan Rekomendasi Izin Apotek</li> <li>OSS dapat dilakukan apabila Aplikasi MASS tidak mengalami gangguan</li> </ol>
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Tidak ada (pelayanan berbasis online)
14.	EVALUASI KINERJA	<ol> <li>Laporan periodik</li> <li>Masukan/saran pemohon/stakeholder</li> <li>Rapat evaluasi tim visitasi</li> </ol>

.

.

# STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI PEMENUHAN KOMITMEN IJIN USAHA OPTIK

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol> <li>Permenkes Nomor 1 Tahun 2016 Penyelenggaraan Optikal inik</li> <li>Permenkes No 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Izin Usaha Secara Elektronik Sektor Kesehatan</li> <li>Peraturan Walikota Madiun No 34 tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun</li> </ol>
2.)	PERSYARATAN (TEKNIS & ADMINISTRASI)	<ol> <li>Surat pernyataan kesanggupan RO penanggung jawab</li> <li>Daftar sarana, prasarana dan peralatan optik</li> <li>SOP pelayanan optik</li> <li>Surat pernyataan kesanggupan sebagai Penanggung Jawab dari Refraksionis Optisien</li> <li>Rekomendasi Organisasi Profesi</li> <li>Surat Pernyataan kerja sama dari laboratorium optik tempat pemrosesan lensalensa pesanan, bila optikal tidak memiliki laboratorium sendiri</li> </ol>
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	Tembusan semua persyaratan (teknis dan administrasi) diserahkan ke Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	7 (tujuh) hari kerja setelah penerimaan berkas lengkap dan tidak ada visitasi ulang
(5.)	BIAYA /TARIF	Tidak dipungut biaya
6.	PRODUK LAYANAN	Surat Rekomendasi Izin Optik
7.	SARANA PRASARANA DAN FASILITAS	<ol> <li>1. 1 (set) komputer</li> <li>2. Ruang kerja penerimaan berkas</li> <li>3. Meja dan kursi kerja</li> <li>4. Kursi tamu untuk pemohon</li> <li>5. Area parkir tamu</li> <li>6. Kamar mandi tamu</li> </ol>
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	D3 Kesehatan
9.	PENGAWASAN INTERNAL	Berita Acara Pemeriksaan Optik ditanda tangani oleh tim visitasi dan diketahui atasan langsung
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Web Dinas Kesehatan &amp; KB Kota Madiun</li> </ol>
11.	EVALUASI PELAKSANAAN	Evaluasi dilaksanakan secara periodik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Optik, rapat koordinasi maupun adanya saran/masukan dari stakeholder
12.	JAMINAN PELAYANAN	SOP Pelayanan Rekomendasi Izin Optik
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Semua sarana, prasarana dan fasilitas memenuhi kriteria K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
14.	EVALUASI KINERJA	<ol> <li>Laporan periodik</li> <li>Masukan/saran pemohon/stakeholder</li> <li>Rapat evaluasi tim visitasi</li> </ol>

1

## STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI IZIN TENAGA KESEHATAN

Ne	PENERBITAN REKOMENDASI IZIN TENAGA KESEHATAN No. KOMPONEN URAIAN				
No.		URAIAN			
1.	DASAR HUKUM	2.	Permenkes No. 357/MENKES/PER/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer Permenkes No. 538/MENKES/ PER/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi		
		3.	Terapis Permenkes No. 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja		
		4.	Tenaga Kefarmasian Kepmenkes No. HK.02.02./Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat		
		5.	Permenkes Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkes 889/MENKES/PER/ V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian		
		6.	Permenkes Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris		
		7.	Permenkes Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostetis		
		8.	Permenkes Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara		
		9.	Permenkes Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis Permenkes Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Praktek Fisioterapis		
			Permenkes Nmor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik ATLM Permenkes Nomor 45 Tahun 2015 tentang		
			Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis Permenkes Nomor 20 Tahun 2016 tentang		
			Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut Permenkes Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017		
			tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016		
			tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Permenkes No 26 Tahun 2018 Tentang		
2	DEDCVADATANI (TEVNIC O		Pelayanan Izin Usaha Secara Elektronik Sektor Kesehatan		
2.	PERSYARATAN (TEKNIS & ADMINISTRASI)	1. 2. 3. 4. 5.	Foto KTP Foto Ijazah Foto Surat Tanda Registrasi Rekomendasi Organisasi Profesi Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan Surat sehat dari dokter yang ber-SIP		
		7.	Pas Foto berwarna		

3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	Semua persyaratan di-scan/foto dan diposting dalam Aplikasi MASS (Madiun Kota Single Submission)	
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	7 (tujuh) hari kerja setelah mendapatkan notifikasi dan lolos verifikasi	
5.	BIAYA /TARIF	Tidak dipungut biaya	
6.	PRODUK LAYANAN	Surat Rekomendasi Izin Tenaga Kesehatan	
7.	SARANA PRASARANA DAN FASILITAS	<ol> <li>1. 1 (set) komputer</li> <li>2. Aplikasi MASS</li> <li>3. Jaringan internet</li> </ol>	
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	D3 Kesehatan	
9.	PENGAWASAN INTERNAL	Verifikasi aplikasi oleh Kepala Seksi	
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Kotak Saran     Web Dinas Kesehatan & KB Kota Madiun	
11.	EVALUASI PELAKSANAAN	Evaluasi dilaksanakan secara periodik berdasarkan lama (respon time) pelayanan, rapat koordinasi maupun adanya saran/masukan dari stakeholder	
12.	JAMINAN PELAYANAN	<ol> <li>SOP Pelayanan Rekomendasi Izin Tenaga Kesehatan</li> <li>Rekomendasi tepat waktu dapat dilakukan apabila Aplikasi MASS tidak mengalami gangguan</li> </ol>	
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Tidak ada (pelayanan berbasis online)	
14.	EVALUASI KINERJA	<ol> <li>Laporan periodik</li> <li>Masukan/saran pemohon/stakeholder</li> <li>Rapat evaluasi tim visitasi</li> </ol>	

# STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PRAKTIK DOKTER/DOKTER GIGI

No.	KOMPONEN	URAIAN	
1.	DASAR HUKUM	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>Permenkes Nomor 2052/Menkes/PER/X/2011 Tahun 2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran</li> <li>Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li> </ol>	
2.	PERSYARATAN (TEKNIS & ADMINISTRASI)	<ol> <li>Salinan STR legalisasi asli oleh KKI</li> <li>Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya</li> <li>Rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik</li> <li>Pas foto berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar</li> </ol>	
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol> <li>Pemohon mengisi form dan melampirkan persyaratan</li> <li>Permohonan diajukan ke petugas</li> <li>Pengecekan kelengkapan berkas</li> <li>Pemrosesan Surat Izin</li> </ol>	
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	7 (tujuh) hari kerja setelah penerimaan berkas lengkap	
5.	BIAYA /TARIF	Tidak dipungut biaya	
6.	PRODUK LAYANAN	Surat Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi	
7.	SARANA PRASARANA DAN FASILITAS	<ol> <li>MEJA, KURSI</li> <li>1 SET KOMPUTER</li> <li>RUANG TUNGGU</li> <li>KAMAR KECIL TAMU</li> <li>AREA PARKIR TAMU</li> </ol>	
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	D3 Kesehatan	
9.	PENGAWASAN INTERNAL	Verifikasi draf Surat Izin Praktik oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang	
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Kotak Saran     Web Dinas Kesehatan & KB Kota Madiun	
11.	EVALUASI PELAKSANAAN	Evaluasi dilaksanakan secara periodik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Apotek, rapat koordinasi maupun adanya saran/masukan dari stakeholder	
12.	JAMINAN PELAYANAN	SOP Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Dokter/ Dokter Gigi	
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Semua sarana, prasarana dan fasilitas memenuhi kriteria K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)	
14.	EVALUASI KINERJA	<ol> <li>Laporan periodik</li> <li>Masukan/saran pemohon/stakeholder</li> <li>Rapat evaluasi tim visitasi</li> </ol>	

3

### STANDAR PELAYANAN KARTU INDONESIA SEHAT PENERIMA BEA IUR DAERAH (KIS PBID)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol> <li>INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL</li> <li>PERPRES NO. 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN</li> <li>PKS ANTARA PEMKOT MADIUN DENGAN BPJS KESEHATAN CABANG MADIUN NOMOR 440/9/401.103/2018 DAN NOMOR 183/KTR/VII-09/1118</li> </ol>
2.	PERSYARATAN (TEKNIS & ADMINISTRASI)	PESERTA BARU  1. FOTO COPY KK  2. FOTO COPY KTP  3. FOTO COPY KIA ANAK  PESERTA PERALIHAN PERUSAHAAN/MANDIRI  1. FOTO COPY KK  2. FOTO COPY KTP  3. FOTO COPY KIA ANAK  4. FOTO COPY SURAT RESIGN, SURAT REFRENSI KERJA (SURAT KETERANGAN SUDAH TIDAK BEKERJA)  5. PESERTA BPJS KELAS 3 YANG NON AKTIF
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol> <li>PESERTA DATANG KE DINKES-KB (MEMBAWA PERSYARATAN)</li> <li>VERIFIKASI PETUGAS</li> <li>USULAN KOLEKTIF DIKIRIM BPJS PER MINGGU</li> <li>PROSES USULAN DAN PROSES CETAK</li> <li>DISTRIBUSI LANGSUNG KE ALAMAT PESERTA</li> </ol>
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	7 (tujuh) hari kerja pengusulan 7 (tujuh) hari kerja pengaktifkan 7 (tujuh) hari kerja pendistribusian
5.	BIAYA /TARIF	Tidak dipungut biaya
6.	PRODÚK LAYANAN	Kartu Indonesia Sehat
7.	SARANA PRASARANA DAN FASILITAS	<ol> <li>MEJA, KURSI</li> <li>1 SET KOMPUTER</li> <li>RUANG TUNGGU</li> <li>NOMOR ANTRIAN</li> <li>KAMAR KECIL TAMU</li> <li>AREA PARKIR TAMU</li> <li>APLIKASI P-CARE</li> </ol>
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	D3 Kesehatan
9.	PENGAWASAN INTERNAL	<ol> <li>LAPORAN HARIAN STAF PELAKSANA</li> <li>LAPORAN/EVALUASI KINERJA</li> <li>EVALUASI KELUHAN/SARAN</li> </ol>
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Web Dinas Kesehatan &amp; KB Kota Madiun</li> </ol>
11.	EVALUASI PELAKSANAAN	Evaluasi dilaksanakan secara periodik berdasarkan masukan/saran masyarakat dan/atau stakeholder, dan rapat koordinasi (internal maupun eksternal)

12.	JAMINAN PELAYANAN	<ul> <li>NO DIRECT COMPLAIN (PESERTA MENERIMA PENJELASAN DARI PETUGAS SESUAI DENGAN PERATURAN)</li> <li>LAPORAN HARIAN STAF PELAKSANA</li> </ul>
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Semua sarana, prasarana dan fasilitas memenuhi kriteria K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
14.	EVALUASI KINERJA	<ol> <li>Laporan periodik</li> <li>Masukan/saran pemohon/stakeholder</li> <li>Rapat evaluasi tim visitasi</li> </ol>

.



## PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Ringroad Barat Madiun Kode Pos 63125 Telepon (0351) 464242 Faks. (0351) 466437 Email: dinkes.madiunkota@gmail.com

# BERITA ACARA KESEPAKATAN STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN NOMOR: 440/ ○→→ /401.103/2020

TANGGAL: 24 JANUARI 2020

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun sebagai penyelenggara pelayanan publik bersama-sama dengan perwakilan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik telah menghasilkan kesepakatan Standar Pelayanan Lingkup Dinas Kesehata dan Keluarga Berencana Kota Madiun yang diantaranya meliputi pelayanan :

- 1. Pelayanan pengurusan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- 2. Pelayanan pengurusan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Jasaboga
- Pelayanan pengurusan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
- 4. Pelayanan pengurusan Surat Keterangan Laik Sehat Hotel.
- 5. Pelayanan pengurusan Surat Keterangan Laik Sehat Depot Air Minum

Standar Pelayanan masing-masing layanan (terlampir) akan dipublikasikan baik secara manual maupun elektronik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaiman mestinya.

#### PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
dr. AGUNG S. WARDANI, M.MKes	KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KB	1
SUPRAPTO,ST	KASI KESEHATAN LING KUNGAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	Juprofto

### PENGGUNA PELAYANAN PUBLIK

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Siti Chomarical	Kadov	Bu.
SITI MOERCHATM	KADER	dus .

Mufidah	Bendahara	Jug
Endah wahyu	Kadeo	ng
Wahru setrouati	Kader	SVM 1



### PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA JI. Ring Road Barat (Kompleks Asrama Haji) Madiun 63125

Telepon (0351) 464242 Fax. (0351) 466437 Email: dinkes.madiunkota@gmail.com

HARI

: JUMAT

TANGGAL : 24 JANUARI 2020

JAM

: 13.00 - SELESAI

TEMPAT

: RUANG RAPAT DINAS KESEHATAN DAN KELUAREGA BERENCANA KOTA MADIUN

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	The Hous.	101	1 the
2	Neva chandras	Push Demangan	2/4
3	DIAH ARISAWATI	PAFI	3
4	or Kerwhw	poshtoro	1 4 JOHN
5	dr. Ulfa K.D	Puckesmus Patitlan	5 Mg /
6	Silverina	prefte Migh	6
7	Harwanto	PPHI Kota	7 \$
8	Yustina	Myoptic	8 lun
9	Suntrai	ADOTEK MEDICO	9 92
10	Yusnizal chan	Apolale Stelie	10 /
11	Mira Cahyaning Tyas	Kinlobflin Kimia Farma	11 WM U
12	Mufidatul M	Cobblin Kuch Farma	12 F
13	Ensah wahyu	PKM Tawang REJO	13 M
14	Wahyu setyouat	Her. PB 0	16 14 g/M .
15	Lilik Ruewantjiri	Itt. Sukosani	15
16	IRA WAHJUNI ARI	KOL. PAMOEAM	16
17	HERMANAM	PORMIKI	17 Han
18	Sn ludah w	181	18
19	Supartin	Kader. Sogalan	19 14
20	DM PAHAYU	leabar soguter	20
21	Kesmydi	KOOPR MIK	21 0
22	Heth'	Kodir Mangu	22 Jul
23	Arif	STEI MON	22 Kh
24	KYSS	STG1 MON	24 Au.
25	& thi Ohomavically	Keder Demangan	25 3

26	S. MOENCHAJINI	KADER KAHIGORO	26 W.
27	Ayu Elvik	Slat	27 Offer
28	FX Iway Arti Guranto	Daka 2 48	28 & One &
29	Ita Widyal	Dinles Kr	29 - HIKE []
30	Dr Gung Ston	pule un	30

Madiun, 24 Januari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KB

KOTA MADIUN

dr. AGUNG SULISTYA WARDANI, M.MKes

Pembina Utama Muda NIP. 19630106 198903 2 007

### PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

JI. Ring Road Barat (Kompleks Asrama Haji) Madiun 63125 Telepon (0351) 464242 Fax. (0351) 466437

Email: dinkes.madiunkota@gmail.com

### BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN ANTARA PENYELENGGARA DENGAN PERANGKAT DAERAH

NOMOR: 067 / 078 / 401.103 / 2020

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh emat bulan Januari Dua Ribu Dua Puluh , kami yang bertanda tangan di bawah ini telah sepakat dalam Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun:

1. Nama

: dr. Agung Sulistya Wardani, M.MKes

NIP

: 19630106 198903 2 007

Pangkat

: IV c / Pembina Utama Muda

Jabatan

: Kepala Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kota Madiun

2. Nama

. KE HOUIA

Jabatan

. SEKRETARIAT 101 CAB. MADIUH

Nama

. Neva Chandra S., SKM, M. Mkes . Ka-UPTO Puskesmas Demangan

Jabatan

Nama

. DIAH ARIBAWATI

Jabatan

SEKRETARIAT PAFI PC KOTA MADIUN

Nama

. Yucrizal Chan

Jabatan

. Apoteker Apotek Sleko

Nama

· Lustinu

Jabatan

Nama

. S. HARWANTO

Jabatan

: PENGUNUS PPNI KOTA MADIUN

Nama

Jabatan

: M. AZIS APY BS . Pengurus STGI CABANG kara Maelun

Nama

. JRA WAHJUH ARI

Jabatan

MASJARAKAT PEMERIMA EISPBID

### Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Madiun, 24 Januari 2020

Pihak Kedua

( IKE HOULA )

Pihak Kedua

Pihak Pertama

dr. AGUNG SULISTYA WARDANI, M.MKES

Pembina Utama Muda NIP. 19630106 198903 2 007

Nevo Chandra S, SKM, MMkes

Pihak Kedua

(DIAH ARIBAWATI )

Pihak Kedua

Yuskral cham

Pihak Kedua

Pihak Kedua

Pihak Kedua

M. AZG AY Pihak Kedua

Daftar Lampiran Berita Acara Hasil Pembahasan Rancangan Standart Pelayanan pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, dengan sebagai berikut ;

- a. Standart Pelayanan Penerbitan Rekomendasi pemenuhan komitmen Ijin Usaha Apotik
- b. Standart Pelayanan Penerbitan Rekomendasi pemenuhan komitmen Ijin Usaha Klinik;
- c. Standart Pelayanan Penerbitan Rekomendasi pemenuhan komitmen Ijin Usaha Laboratorium Klinik;
- d. Standart Pelayanan Penerbitan Rekomendasi pemenuhan komitmen Ijin Usaha Toko Obat;
- e. Standart Pelayanan Penerbitan Rekomendasi pemenuhan komitmen Ijin Usaha Rumah Sakit ;
- f. Standart Pelayanan Penerbitan Rekomendasi pemenuhan komitmen Ijin Usaha Optik;
- g. Standart Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Ijin Tenaga Kesehatan
- h. Standart Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Ijin Praktik Dokter /Dokter Gigi
- i. Standart Pelayanan Kartu Indonesia Sehat penerima Bea Iur Daerah (KIS PBID)
- j. Standart Pelayanan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan / Restoran
- k. Standart Pelayanan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga
- 1. Standart Pelayanan Penerbitan Sertifikat Laik Sehat Hotel
- m. Standart Pelayanan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum
- n. Standart Pelayanan peneribitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)

KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KB

KELUARGA BERENCAS

DINAS KESEHATAN

dr. AGUNG S. WARDANI, M. MKes

NIP. 19630106 198903 2 007











